

**ANALISIS PERBEDAAN AKTIVITAS OFFLINE DAN DIGITAL PADA
DEMONSTRASI BUBARKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
DI INDONESIA**

Ujian Tengah Semester Metode Penelitian Administrasi Publik

Oleh

DYAH PUTRI AMBARWATI

NPM 2416041118



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Konsep dan Teori Gerakan Sosial dan Demonstrasi	6
2.2 Aktivitas <i>Offline</i> pada Gerakan Sosial dan Demonstrasi	7
2.3 Media Digital dan Aktivisme Daring	8
2.4 Penelitian Terdahulu	9
2.5 Kerangka Berpikir	11
III. METODE PENELITIAN	13
3.1 Tipe Penelitian	13
3.2 Fokus Penelitian	14
3.3 Lokasi Penelitian	15
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	16
3.5 Teknik Pengumpulan Data	17
3.6 Teknik Analisis Data	18
3.7 Teknik Keabsahan Data	19
DAFTAR ISI	20

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa merupakan media yang digunakan sebagai luapan psikologis berupa perasaan dan keinginan. Bahasa digunakan sebagai alat dan media berkomunikasi proses menyampaikan pesan berupa maksud penutur kepada lawan tuturnya. Manusia memakai dua cara berkomunikasi, yaitu secara verbal dan nonverbal. Bahasa mempermudah segala aktivitas dan kegiatan berkomunikasi kita, sebagaimana manusia tidak bisa lepas dari perkomunikasian. Komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara verbal maupun verbal nonverbal dengan tujuan memahami maksud dari informasi yang disampaikan orang lain (Desmirasari & Oktavia, 2022). Penggunaan komunikasi secara verbal dapat dilakukan melalui tulisan dan lisan, sedangkan komunikasi secara nonverbal ialah penggunaan selain menggunakan media bahasa. Salah satu fungsi bahasa yang paling penting ialah guna menyampaikan pendapat.

Indonesia pasca-Reformasi 1998, menetapkan dirinya sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak untuk melakukan demonstrasi dijamin oleh konstitusi dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam kerangka ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan dan perundang-undangan negara. Namun, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin hari seringkali menjadi sasaran kritik publik, memicu gelombang protes.

Gerakan yang menuntut pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau menolak kebijakan kontroversial Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menjadi fenomena berulang. Misalnya, protes besar-besaran terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Omnibus Law Cipta Kerja pada periode 2019-2021 menunjukkan tingkat ketidakpercayaan

publik yang tinggi terhadap lembaga representatif ini. Contoh kasus terbaru pada akhir Agustus hingga September 2025, telah terjadi demonstrasi lagi yang berhubungan dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu tentang kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dirasa cukup berlebihan, apalagi disaat seperti ini masyarakat sedang dilanda kesulitan finansial, sementara para pejabat malah merasakan kekayaan yang tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Hal inilah yang memicu amarah masyarakat sehingga terjadi aksi demonstrasi ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di berbagai daerah Indonesia. Gerakan ini tidak hanya dimobilisasi melalui aksi massa di jalan (Offline) tetapi juga melalui kampanye masif di ranah digital. Inilah yang melahirkan dikotomi penting dalam studi aktivisme kontemporer.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Secara definitif, aksi demonstrasi diartikan sebagai “tindakan bersama berupa perarakan untuk menyatakan protes, perasaan tidak setuju”. Fenomena ini menjadi relevan untuk dikaji yang menekankan pada perbedaan aktivisme offline dan digital. Aktivisme offline berlandaskan pada teori mobilisasi sumber daya dan proses politik, yang menekankan pada pertemuan fisik, alokasi sumber daya konvensional, dan risiko fisik. Sebaliknya, aktivisme digital yang dipelopori oleh media sosial, menawarkan kecepatan, jangkauan global, dan anonimitas yang relatif. Para aktivis kini memanfaatkan platform seperti Twitter dan Instagram sebagai ruang publik baru.

Penelitian ini berkaitan atau berfokus pada demonstrasi yang terjadi pada Agustus hingga September 2025, yaitu tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun tunjangan mereka dinaikkan menjadi tiga juta/hari. Hal ini menyulut emosi masyarakat dan terjadilah demonstrasi secara offline dan digital di berbagai daerah Indonesia. Seruan demonstrasi ini pertama kali muncul lewat pesan berantai dari grup percakapan *Whatsapp* dan berbagai media sosial seperti Tiktok, X, dan Instagram. Ajakan dari kelompok yang menamakan diri "Revolusi Rakyat Indonesia" itu disebar hampir seminggu sebelum pelaksanaan. Mereka mengajak elemen masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa turun ke jalan.

Dalam narasinya, kelompok ini menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi keluarga mantan presiden Joko Widodo hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tak hanya itu, mereka juga meramaikan seruan untuk membubarkan lembaga parlemen. Pada hari pelaksanaan, aksi itu dihadiri oleh ratusan massa dari berbagai kalangan tanpa identitas kelompok. Demonstrasi berlangsung hingga malam. Namun, anggota parlemen tidak ada yang menemui massa. Aksi demonstrasi ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan lainnya hingga awal September 2025. Respon Gubernur daerah masing-masing ada yang menyuarakan aspirasi dengan damai, adapula yang tidak menanggapi aspirasi masyarakat, sehingga hal inilah yang menyulut amarah masyarakat hingga bertindak secara anarkisme.

Penelitian ini berangkat dari premis bahwa meskipun saling terkait, aktivitas offline dan digital memiliki karakteristik, logika, dan dinamika yang berbeda. Aktivisme di jalanan menuntut kehadiran fisik, risiko personal, dan interaksi tatap muka yang menciptakan solidaritas unik. Sebaliknya, aktivisme digital menawarkan anonimitas, kecepatan, dan jangkauan yang lebih luas, tetapi juga rentan terhadap disinformasi dan polarisasi. Memahami perbedaan ini bukan hanya penting untuk menganalisis perbedaan aktivitas offline dan digital pada demonstrasi bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi juga untuk memetakan masa depan gerakan sosial di era konvergensi media.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena di atas, penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana karakteristik aktivitas demonstrasi offline (di jalanan) pada Demonstrasi Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia?
2. Bagaimana karakteristik aktivitas aktivisme digital (di media sosial) terkait Demonstrasi Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia?

3. Mengapa terjadi perbedaan narasi, mobilisasi, dan strategi komunikasi antara aktivitas offline dan digital dalam demonstrasi ini?
4. Bagaimana interaksi dan distinasi (perbedaan mendasar) antara aktivitas offline dan digital membentuk identitas, efektivitas, dan arah pergerakan massa dalam Demonstrasi Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis karakteristik aktivitas demonstrasi offline (di jalanan) pada Demonstrasi Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia.
2. Menganalisis Bagaimana karakteristik aktivitas aktivisme digital (di media sosial) terkait Demonstrasi Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia.
3. Menganalisis perbedaan narasi, mobilisasi, dan strategi komunikasi antara aktivitas offline dan digital dalam demonstrasi ini.
4. Menganalisis interaksi dan distinasi (perbedaan mendasar) antara aktivitas offline dan digital membentuk identitas, efektivitas, dan arah pergerakan massa dalam Demonstrasi Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini menyumbangkan data empiris spesifik Indonesia untuk menguji dan mengembangkan teori-teori gerakan sosial, khususnya mengenai aktivisme hibrida (hybrid activism). Penelitian ini menganalisis interaksi dan perbedaan taktis antara aktivitas digital (seperti kampanye tagar, meme, dan mobilisasi melalui media sosial) dan aktivitas *offline* (aksi massa, orasi, dan *long march*) dalam konteks isu nasional yang sensitif, yakni tuntutan pembubaran DPR. Penelitian ini menawarkan model analisis komparatif yang dapat digunakan

untuk studi lanjutan. Dengan membandingkan metrik mobilisasi, jangkauan, risiko, dan dampak pada kedua ranah, penelitian ini memberikan kerangka kerja yang solid bagi peneliti lain yang ingin meneliti fenomena politik yang melibatkan aktivisme *online* dan *offline*.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Aktivis dan Organisasi Gerakan Sosial:

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman strategis bagi organisasi mahasiswa, aktivis, dan kelompok sipil dalam merancang kampanye protes yang lebih efektif. Mereka dapat memahami keunggulan komparatif dari setiap saluran (digital untuk kecepatan/jangkauan, *offline* untuk tekanan langsung) dan merumuskan strategi sinergi untuk memaksimalkan dampak politik dari tuntutan "Bubarkan DPR" atau isu serupa.

2. Bagi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):

Penelitian ini memberikan masukan empiris mengenai mekanisme *feedback* dan ekspresi ketidakpuasan publik. DPR dapat menggunakan temuan ini untuk memahami secara mendalam narasi, taktik, dan basis mobilisasi yang digunakan masyarakat baik di ruang fisik maupun ruang siber, sehingga dapat merespons tuntutan publik dengan kebijakan yang lebih adaptif dan informatif.

3. Bagi Pemerintah dan Aparat Keamanan:

Analisis ini membantu pihak pemerintah dan aparat keamanan dalam memetakan pola ancaman dan mobilisasi yang didorong oleh platform digital. Dengan memahami perbedaan risiko dan kecepatan penyebaran antara aksi *offline* dan *online*, aparat dapat membuat kebijakan keamanan dan manajemen kerumunan yang lebih tepat dan proporsional.

4. Bagi Media Massa dan Jurnalis:

Penelitian ini membantu media massa dalam melaporkan dinamika protes secara lebih komprehensif. Jurnalis dapat memahami bagaimana narasi *online* memengaruhi realitas *offline* dan sebaliknya, memastikan liputan yang berimbang dan mendalam terhadap demonstrasi berskala nasional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Teori Gerakan Sosial dan Demonstrasi

Para ilmuwan tidak memiliki kesepakatan dalam menggambarkan konsep gerakan sosial, melainkan deskripsi dibawah ini akan menunjukkan pengertian dari gerakan sosial dari teori-teori utama gerakan sosial (Wiranata, 2022).

Analisis mendalam mengenai gerakan sosial didominasi oleh tiga kerangka teoritis utama. **Teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory*)** dalam pandangan McCarthy & Zald (1977, hal. 1217-180) menekankan bahwa gerakan sosial adalah serangkaian kepercayaan dan pendapat dalam suatu masyarakat yang mewakili preferensi untuk mengubah bagian-bagian dari struktur sosial atau distribusi manfaat (*reward*) dari suatu masyarakat. Menurut review Edward dan Patrick, konsep utama dari Teori Mobilisasi Sumber Daya (*RMT*) bertujuan untuk memahami bagaimana gerakan sosial yang terjadi pada 1960-an. Tokoh utama teori ini yaitu M. Zald yang memperkenalkan konsep “industri gerakan sosial” yang terdiri dari organisasi-organisasi gerakan sosial yang saling bekerja sama dan bersaing dalam memobilisasi sumber daya. Teori ini muncul karena mengkritik pandangan sebelumnya, seperti pespektif fungsionalis yang menganggap aktor gerakan sosial sebagai anomali atau devian dan anggapan pluralistik bahwa semua pelaku politik memiliki kesempatan yang sama, serta ingin membuktikan bahwa gerakan sosial dilakukan secara terencana, bukan tanpa alasan yang jelas maupun hanya berdasarkan impuls.

Di sisi lain, **Teori Proses Politik (*Political Process Theory*)** berfokus pada peran peluang politik, seperti liberalisasi rezim atau perpecahan elit sebagai pemicu munculnya gerakan. Doug McAdam mengemukakan bahwa teori proses politik merujuk pada teori kemunculan gerakan yang digambarkan dalam bukunya pada 1982, *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930–1970*. Dalam bukunya, ia menyatakan teori tersebut sebagai alternatif dari dua perspektif lainnya (McAdam, 2013, hlm. 1). Sebelum konsep ini muncul, para peneliti sosial menganggap bahwa anggota gerakan sosial sebagai individu yang dianggap gila dan tidak masuk akal. Mereka cenderung mengkategorikan mereka sebagai individu yang menyimpang, bukan sebagai partisipan yang aktif di ranah politik. Namun setelah dilakukan penelitian terbaru, teori proses politik menggoyahkan pandangan tersebut dan mengungkapkan asal usul elitis, patriarki, dan rasialis yang mengganggu (*What Makes a Social Movement Successful?*, t.t.).

Sementara itu, **Teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement Theory*)** menggeser fokus dari politik konvensional dan sumber daya ke isu-isu kultural dan non-material seperti kualitas hidup dan identitas, yang relevan dengan kasus-kasus kontemporer, termasuk aktivisme digital yang menjadi objek studi ini (Cohen, 1985). Teori Gerakan Sosial Baru oleh pemikiran Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe adalah teori yang menjelaskan bentuk perlawanan-perlawanan atas bentuk-bentuk penindasan yang terjadi pada masyarakat kapitalis tingkat lanjut. Ernesto

Laclau dan Chantal Mouffe yang merupakan ahli dalam teori gerakan sosial mengemukakan bahwa gerakan sosial sebagai perjuangan demokratik baru (Mouffe, 1988). Perbedaan dan interaksi dari teori-teori ini krusial untuk menganalisis dinamika aksi *offline* dan *online* dalam sebuah demonstrasi.

Dalam pandangan Tilly (2004), demonstrasi sebagai salah satu repertoar aksi utama berfungsi sebagai manifestasi publik dan simbolis dari kekuatan gerakan. Demonstrasi bertujuan menarik perhatian media dan pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat identitas kolektif dan solidaritas di antara para partisipan. Tur Santoso menyatakan bahwa aksi demonstrasi merupakan suatu bentuk menyuarakan pendapat, tuntutan, opini maupun pernyataan sikap yang biasa dilakukan oleh sekelompok orang dengan teknik serta tujuan tertentu untuk mendapat atensi dari pihak yang ingin dituju tanpa memanfaatkan mekanisme birokrasi. Aksi demonstrasi biasanya dilatarbelakangi oleh buntutnya jalur dialog serta matinya jalan dari penyampaian aspirasi (Santoso, 2009).

2.2 Aktivitas *Offline* pada Gerakan Sosial dan Demonstrasi

Aktivitas *offline* atau luring dalam gerakan sosial dan demonstrasi adalah fondasi dari aktivisme tradisional, yang melibatkan partisipasi fisik dan interaksi tatap muka. Bentuk-bentuk aktivitas ini telah menjadi inti dari perjuangan politik dan sosial selama berabad-abad, jauh sebelum munculnya media digital. Aksi-aksi luring seperti unjuk rasa, pawai, boikot, dan pendudukan ruang publik menjadi manifestasi nyata dari ketidakpuasan kolektif. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian media, menggalang dukungan publik, dan menekan pembuat kebijakan. Kehadiran fisik yang masif, spanduk-spanduk berisi pesan, orasi yang lantang, dan yel-yel serempak menciptakan sebuah spektakel visual dan audibel yang sulit diabaikan. Hal ini tidak hanya menunjukkan jumlah kekuatan, tetapi juga mengkomunikasikan tekad dan solidaritas yang kuat di antara para partisipan.

Aktivitas luring memainkan peran penting dalam membangun identitas kolektif dan solidaritas. Ketika individu berkumpul di satu tempat untuk satu tujuan, mereka berbagi pengalaman emosional yang intens. Pengalaman bersama ini, seperti rasa kebersamaan, semangat perjuangan, dan potensi menghadapi risiko, memperkuat ikatan di antara mereka dan membentuk "kita" melawan "mereka." Para sosiolog seperti Melucci (1995) dan Della Porta & Diani (2009) menekankan bagaimana interaksi tatap muka ini adalah kunci dalam menciptakan rasa memiliki dan tujuan bersama yang mendalam, yang tidak bisa sepenuhnya direplikasi melalui interaksi digital. Dengan demikian, kegiatan luring tidak hanya sekadar alat untuk menuntut perubahan, tetapi juga merupakan proses fundamental dalam membentuk dan memperkuat komunitas politik.

Namun, aktivitas luring juga menghadapi sejumlah tantangan. Organisasi demonstrasi fisik memerlukan sumber daya yang besar, mulai dari logistik, perizinan, hingga penggalangan massa. Selain itu, partisipan sering kali dihadapkan pada risiko keamanan seperti penangkapan, kekerasan, dan represi dari aparat keamanan atau kelompok lawan. Terlepas dari risiko tersebut, partisipasi luring sering dianggap sebagai bentuk komitmen yang lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi daring yang minim risiko. Para aktivis yang hadir secara fisik

menunjukkan kesediaan mereka untuk berkorban, yang memberikan legitimasi moral dan politik yang lebih besar pada gerakan mereka. Hal ini sejalan dengan teori mobilisasi sumber daya, di mana sumber daya manusia yang berkomitmen tinggi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu gerakan (McCarthy & Zald, 1977).

Secara ringkas, aktivitas *offline* dalam gerakan sosial lebih dari sekadar "cara lama" dalam beraktivisme. Mereka adalah elemen vital yang memberikan dimensi fisik, emosional, dan sosial yang mendalam pada gerakan, melengkapi dan memperkuat jangkauan aktivitas digital.

2.3 Media Digital dan Aktivisme Daring

Perkembangan pesat media digital, terutama internet dan platform media sosial, telah mengubah lanskap aktivisme politik dan sosial. Konsep aktivisme daring (*digital activism*) mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memobilisasi, mengkoordinasi, dan menyebarkan pesan-pesan terkait gerakan sosial. Media digital seperti Twitter, Tiktok, dan Instagram telah menjadi alat vital yang memungkinkan para aktivis untuk mengatasi hambatan geografis dan waktu, serta memperluas jangkauan gerakan jauh melampaui batas-batas fisik.

Satu perdebatan utama dalam literatur tentang aktivisme daring adalah apakah teknologi ini sungguh-sungguh efektif dalam memicu perubahan sosial yang substansial. Pandangan optimis, seperti yang diusung oleh Bennett dan Segerberg (2012), berpendapat bahwa media digital memfasilitasi "tindakan konektif" (*connective action*). Ini adalah bentuk partisipasi yang tidak terpusat dan digerakkan oleh individu, di mana setiap orang berkontribusi pada gerakan dengan cara yang personal, seperti berbagi cerita atau gambar. Teori ini menyoroti bagaimana platform digital menurunkan biaya partisipasi, memungkinkan individu untuk terlibat tanpa harus menjadi bagian dari organisasi formal. Alhasil, media sosial dapat dengan cepat menggalang dukungan massal dan menciptakan momentum publik yang signifikan dalam waktu singkat, seperti yang terlihat dalam banyak gerakan protes global.

Namun, tidak semua pandangan begitu optimistis. Kritikus seperti Evgeny Morozov (2011) memperkenalkan istilah "*slacktivism*", sebuah gabungan dari kata *slacker* (pemalas) dan *activism*. *Slacktivism* merujuk pada partisipasi dangkal, di mana individu melakukan tindakan mudah seperti "suka" atau "bagikan" tanpa keterlibatan nyata yang berisiko atau berkelanjutan. Kekhawatiran ini menggarisbawahi pertanyaan penting tentang efektivitas nyata dari aktivisme digital. Apakah sebuah kampanye tagar yang viral benar-benar dapat menggantikan demonstrasi fisik yang menekan dan terorganisir? Tinjauan ini menunjukkan bahwa aktivisme daring mungkin lebih efektif dalam menarik perhatian dan membangun kesadaran daripada memobilisasi aksi nyata di lapangan atau mencapai perubahan kebijakan yang konkret.

Meskipun demikian, studi-studi terbaru mengakui bahwa hubungan antara aktivitas daring (*online*) dan luring (*offline*) sangatlah kompleks. Keduanya tidak beroperasi secara terpisah, melainkan dalam sebuah sistem media hibrida (Chadwick, 2013).

Aktivitas daring seringkali berfungsi sebagai alat mobilisasi logistik untuk demonstrasi fisik, memberikan informasi real-time tentang lokasi, waktu, dan tujuan. Sebaliknya, demonstrasi luring menghasilkan konten visual yang kuat yang kemudian disebarluaskan secara daring, memperkuat pesan dan memperluas jangkauan gerakan. Dengan kata lain, media digital dan aktivitas fisik saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam siklus dinamis, menciptakan ekosistem yang kohesif bagi gerakan sosial modern.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian Terdahulu	Fokus Kasus & Temuan Kunci
1.	Rahmawan, D., Mahameruaji, J. N., & Janitra, P. A. (2020)	Strategi aktivisme digital di Indonesia: aksesibilitas, visibilitas, popularitas dan ekosistem aktivisme	Fokus: Analisis literatur mengenai konsep dan mekanisme yang mendasari praktik aktivisme digital. Temuan: Aktivisme digital sangat bergantung pada algoritma (<i>visibilitas</i>) dan metrik (<i>popularitas</i>) media digital. Perlu dilihat secara komprehensif, tidak hanya teknologi, tetapi juga konteks sosial dan budaya.
2.	Sitowin, P., & Alfirdaus, L. K. (2019)	Media sosial dan gerakan sosial studi kasus: Penggunaan instagram dalam penolakan pendirian pabrik semen di kabupaten Rembang.	Fokus: Analisis peran media sosial (Instagram) dalam menguatkan gerakan masyarakat sipil yang menolak pabrik semen (isu lokal/lingkungan) Temuan: Media sosial efektif untuk advokasi dan memperkuat gerakan <i>offline</i> , tetapi bukan solusi utama, terutama bagi kelompok yang tidak melek teknologi.
3.	Pora, S., Nurmiyati, N., Syarifuddin, T. I., & Saputra, H. A. (2021)	Transformasi Aktivitas K-Popers Di Media Sosial: Analisis Drone Emprit Dalam Framing Isu UU Cipta Kerja: Transformation Of K-Popers Activities In Social Media: Analysis Of Drone Emprit In Framing Issues Of Work Copyration.	Fokus: Analisis peran media sosial (Twitter/X) dalam framing isu besar seperti penolakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Temuan: Keterlibatan kelompok non-politik (seperti K-Popers) menghadirkan warna baru dalam perlawanan melalui media sosial, menghasilkan <i>trending topic</i> yang menekan pemerintah, dan memobilisasi massa <i>offline</i> .

4.	Gozali, F. (2023)	Peranan Media Sosial dalam Gerakan# ReformasiDikorupsi Menolak UU KPK Tahun 2019	Fokus: Mengkaji bagaimana Twitter berperan dalam pembentukan dan pelaksanaan Gerakan Reformasi Dikorupsi (isu politik nasional). Temuan: Twitter digunakan untuk meningkatkan kesadaran, mengumpulkan dan mengorganisir aksi langsung (<i>offline</i>) di berbagai kota, dan komunikasi saat demo berlangsung.
----	-------------------	--	---

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah:

1. Perbedaan dengan Rahmawan, dkk. (2020)

Penelitian Rahmawan bersifat konseptual dan **kajian literatur** tentang ekosistem aktivisme digital. Sementara penelitian ini bersifat empiris dan studi kasus (Demonstrasi Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)). Penelitian ini tidak hanya menjelaskan strategi aktivisme digital, tetapi membandingkan hasilnya dengan dampak fisik dari aktivitas *offline*.

2. Perbedaan dengan Sitowin & Alfirdaus (2019)

Fokus Sitowin adalah pada isu lokal/lingkungan (pabrik semen) dan penggunaan satu *platform* (Instagram) untuk advokes. Sementara, fokus penelitian ini adalah isu politik nasional yang ekstrem Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan membandingkan dua ranah aktivisme (*offline* dan *digital* secara menyeluruh), bukan hanya peran *digital* dalam mendukung *offline*.

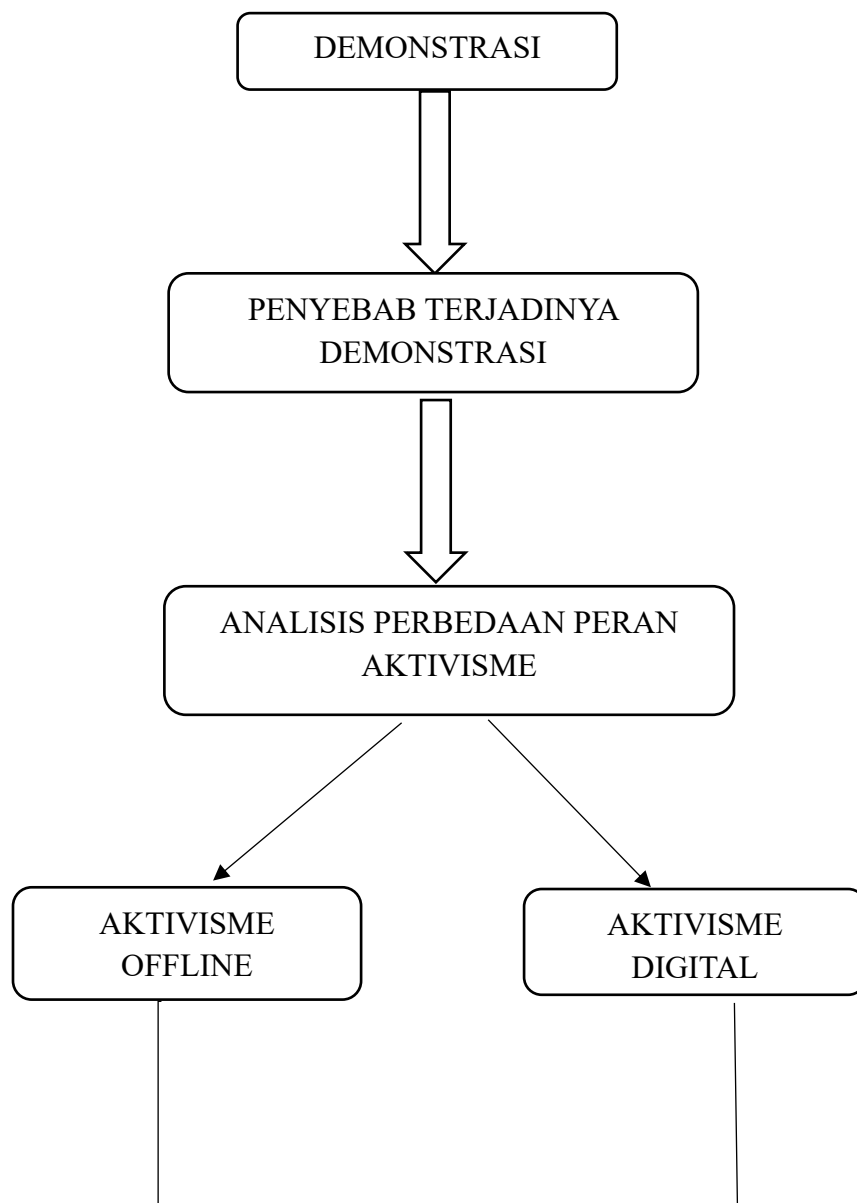
3. Perbedaan dengan Pora, dkk. (2021)

Fokus Pora adalah pada aktor baru (K-Popers) dan analisis *framing* di media sosial (Twitter) pada isu UU Cipta Kerja. Sementara penelitian ini tidak berfokus pada aktor atau *framing* semata, melainkan pada perbedaan taktis dan dampak nyata yang dihasilkan oleh kedua jenis aktivitas (protes di jalan vs. kampanye di media sosial) dalam upaya menekan DPR.

4. Perbedaan dengan Gozali (2023)

Gozali berfokus pada peran X dalam mobilisasi aksi Reformasi Dikorupsi (isu UU KPK). Intinya adalah *online* mengorganisir *offline*. Sementara penelitian ini berfokus pada perbandingan kontras dan sinergi dari kedua aktivitas tersebut. Penelitian ini menguji seberapa jauh aktivitas *digital* dapat berdiri sendiri sebagai tekanan politik, dibandingkan dengan aktivitas *offline* dalam kasus tuntutan pembubaran lembaga tinggi negara.

2.5 Kerangka Berpikir





Gambar 1. Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kualitatif deskriptif memberikan gambaran kondisi apa adanya, tanpa memanipulasi pada unsur yang diteliti. Metode penelitian kualitatif menggunakan teknik observasi terlibat langsung atau riset partisipatori, sehingga peneliti terlibat langsung atau berbau dengan yang diteliti. Terbangun rasa saling percaya karena peneliti tidak mengambil jarak dengan objek yang diteliti. Dalam praktiknya, peneliti akan melakukan review terhadap berbagai foto-foto atau dokumen. Interview terbuka, tidak terstruktur atau terstruktur dan tertutup struktur atau tidak struktur adalah jenis interview yang digunakan. Sedangkan analisis datanya bersifat induktif dan berkelanjutan yang tujuan akhirnya menghasilkan konsep, pengertian, dan pembangunan suatu teori yang baru.

Menurut Nawawi (dalam Ni'mah 2016:46) penelitian kualitatif dapat menghimpun daya yang sewajarnya, menggunakan cara yang terarah, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan karena tidak kehilangan sifat kealamiannya. Berdasarkan sifat penelitian yang telah dipilih, penelitian tipe ini bersifat instrumental dan didasarkan pada sifat masalah yang diteliti, yakni menganalisis secara mendalam dan komprehensif perbedaan dan interaksi antara dua bentuk aktivitas yang berbeda, yakni aktivitas *offline* (aksi fisik di lapangan) dan aktivitas digital (aktivitas di media sosial) dalam konteks demonstrasi bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia.

Pendekatan kualitatif ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan interpretasi aktor di lapangan, sebuah kebutuhan krusial yang tidak dapat dipenuhi oleh metode kuantitatif (Creswell, 2016:14; Yin, 2018:55). Pemilihan studi kasus tunggal bertujuan untuk memastikan kedalaman dan validitas kontekstual temuan dalam memahami dinamika yang sangat spesifik dari pergerakan sosial di wilayah tersebut.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam interaksi dan perbedaan strategis antara aktivitas *offline* dan digital yang terwujud dalam kasus Demonstrasi Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia. Studi-studi dewasa ini menunjukkan bahwa gerakan sosial di era digital tidak lagi beroperasi secara terpisah, melainkan dalam ekosistem *hybrid* di mana ruang fisik dan ruang maya saling menguatkan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada upaya untuk membongkar mekanisme internal dalam kasus tersebut, khususnya dengan membedah peran platform media sosial sebagai alat mobilisasi, konteks narasi, dan penghubung antara berbagai kelompok aktivis lokal dan khalayak umum. Dengan memusatkan perhatian pada kasus yang terbatas ini, peneliti bertujuan untuk menghasilkan temuan yang kaya konteks dan interpretatif, yang menjelaskan bagaimana dan mengapa aktivis di Indonesia memanfaatkan dinamika *hybrid* untuk mencapai tujuan protes mereka.

Fokus penelitian ini kemudian diperinci ke dalam dua dimensi analisis utama. Dimensi pertama berpusat pada perbedaan strategi dan konteks di dua ranah tersebut. Di ranah *offline*, fokus akan diarahkan pada analisis konten orasi, *performance* simbolik, dan tuntutan formal yang disampaikan di lapangan, yang cenderung bersifat formal dan terpusat (Fu, 2018). Sebaliknya, di ranah digital, fokus ditujukan pada analisis narasi yang disebarkan, termasuk penggunaan *hashtag* yang bersifat viral, penyebaran berita online, dan *live reporting* yang cenderung lebih emosional, cair, dan terdesentralisasi. Perbedaan ini krusial untuk memahami apakah aktivis menggunakan media digital hanya sebagai corong untuk aksi *offline*, atau justru sebagai ruang independen untuk membentuk opini publik yang mungkin tidak tercakup dalam aksi fisik. Penelitian ini berupaya menjawab: sejauh mana narasi digital mengkonfirmasi atau justru mendistorsi pesan aksi *offline*?

Dimensi kedua dari fokus penelitian ini adalah pada interaksi dan mekanisme umpan balik antara kedua ranah tersebut, menempatkan studi kasus ini dalam perspektif Politik Digital (Gerbaudo, 2021:45). Fokus akan ditempatkan pada identifikasi alur informasi: Pertama, alur dari *offline* ke digital (misalnya,

bagaimana rekaman video aksi di jalanan didorong menjadi *trending* topik). Kedua, alur dari digital ke *offline* (misalnya, bagaimana petunjuk logistik dan koordinasi massa disebarkan melalui grup tersembunyi di media sosial yang kemudian memengaruhi jumlah dan perilaku peserta di lapangan). Memahami mekanisme interaksi dua arah ini sangat penting untuk mengungkap infrastruktur koordinasi gerakan sosial pasca-2020, yang mana efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemampuan para aktivis mengelola visibilitas dan logistik di ruang *hybrid* tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini secara spesifik berpusat pada dua arena utama yang saling terhubung dalam kasus Demonstrasi Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia., yaitu lingkungan kampus sebagai sentra mobilisasi dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai titik puncak aksi *offline*. Pemilihan lokasi ini sangat krusial karena studi-studi dewasa ini menunjukkan bahwa lingkungan kampus, khususnya di Indonesia, seringkali menjadi laboratorium atau hubungan intelektual utama bagi gerakan sosial dan politik. Kampus adalah tempat strategis di mana aktivitas digital seperti perumusan tuntutan, desain poster, dan koordinasi internal dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebelum diterjemahkan menjadi aktivitas *offline* yang terorganisir. Oleh karena itu, penelitian akan berfokus pada kampus-kampus yang teridentifikasi sebagai basis massa utama dalam aksi, untuk memahami proses pra-aksi dan pembimbingan digital mereka.

Fokus utama penelitian di lingkungan kampus akan diarahkan pada basis organisasi mahasiswa dan peserta aksi individual yang terlibat. Secara kelembagaan, subjek penelitian berlokasi di sekretariat dan ruang diskusi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di beberapa kampus terkemuka di Indonesia Seperti Universitas Indonesia, Universitas Lampung, Universitas Trisakti, dan sebagainya. Lokasi ini menjadi krusial untuk menggali data kualitatif mengenai *flow* atau alur informasi, proses pengambilan keputusan politik internal, serta penggunaan *platform* digital (seperti grup WhatsApp atau postingan Instagram) untuk koordinasi logistik dan penggalangan massa. Sementara itu, lokasi aksi *offline* yang menjadi tujuan akhir

demonstran, yaitu Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan dijadikan lokasi untuk observasi partisipatif dan analisis konten pesan yang disampaikan secara fisik. Interaksi antara koordinator lapangan dengan aparat keamanan dan publik di lokasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah titik penting di mana narasi digital diuji validitas dan dampaknya di ruang publik.

Dengan demikian, penetapan dua lokasi terpisah ini *starting point* (kampus) dan *end point* (Kantor Dewan Perwakilan Rakyat) memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis *hybrid* yang komprehensif. Lingkungan kampus merepresentasikan ranah digital dan perencanaan strategis, sementara Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merepresentasikan ranah *offline* dan manifestasi fisik dari aktivisme. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan triangulasi lokasi untuk memverifikasi konsistensi narasi digital yang dibangun di kampus dengan realitas aksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga memperkuat validitas temuan. Melalui fokus ganda ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran utuh tentang anatomi gerakan mahasiswa yang mengandalkan sinergi aktivitas *hybrid* di Indonesia.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini sebagai studi kasus kualitatif akan mengandalkan pada dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder untuk mencapai pemahaman holistik mengenai interaksi aktivitas *offline* dan digital (Yin, 2018:118). Data primer merupakan data inti yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan, yang meliputi informasi mendalam mengenai motif, strategi, dan pengalaman subjektif para aktor. Sumber data primer akan difokuskan pada wawancara mendalam dengan koordinator utama dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam demonstrasi di Indonesia, serta wawancara dengan perwakilan peserta aksi individual dan pihak pengamanan (aparat atau rektorat). Penggunaan wawancara ini krusial untuk menggali pemahaman *emic*, yaitu pandangan dari dalam subjek penelitian itu sendiri terkait perbedaan *framing* yang mereka gunakan di ruang digital versus ruang fisik.

Data sekunder akan berfungsi sebagai pelengkap dan kontekstualisasi data primer, khususnya dalam menganalisis aktivitas digital dan narasi publik. Sumber data sekunder akan sangat beragam, meliputi:

1. Dokumen Publik Resmi, seperti surat pemberitahuan aksi kepada kepolisian atau DPR dan *press release* resmi dari BEM yang digunakan untuk *framing* pesan formal.
2. Data Digital Mentah, yang mencakup tangkapan layar, rekaman video, dan data *scraping* atau hasil penelusuran kata kunci dari platform media sosial (seperti *hashtag* yang menjadi *trending topic* di *Twitter/X*, unggahan *Instagram stories* atau *post* di *feeds*, dan konten dari saluran *Telegram/WhatsApp* kelompok aktivis). Data digital ini sangat penting untuk membandingkan narasi spontan dan informal yang beredar di ruang maya dengan tuntutan formal di lapangan.
3. Catatan Media Massa Lokal mengenai jalannya demonstrasi juga akan digunakan untuk memberikan perspektif *etic* luar terhadap peristiwa yang dikaji.

Secara metodologis, pendekatan ganda ini memastikan triangulasi data yang kuat, di mana temuan dari wawancara (data primer) dapat diverifikasi dan diperkaya dengan bukti dari dokumen resmi dan data digital (data sekunder). Integrasi sumber data ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi mekanisme umpan balik (*feedback loop*) antara mobilisasi digital dan pelaksanaan aksi *offline* yang sulit ditangkap hanya dengan satu jenis data. Dengan memfokuskan sumber data pada lingkungan kampus sebagai basis perencanaan dan DPR sebagai titik aksi, penelitian ini menjamin bahwa seluruh data yang terkumpul memiliki relevansi kontekstual yang tinggi terhadap studi kasus Demonstrasi Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia, sehingga mencapai kedalaman analisis sesuai tuntutan studi kualitatif.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dirancang secara triangulatif untuk memaksimalkan kedalaman dan validitas temuan, khususnya dalam menganalisis fenomena *hybrid* antara aktivisme *offline* dan digital (Yin, 2018:120). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan adalah:

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interviews*).
Wawancara akan dilakukan secara terstruktur namun fleksibel terhadap kunci informan, yaitu koordinator lapangan, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari kampus-kampus utama yang terlibat dalam Demonstrasi Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia, dan perwakilan peserta aksi. Tujuannya adalah untuk menggali data primer mengenai strategi mobilisasi, perbedaan *framing* narasi yang digunakan di ruang fisik dan ruang maya, serta motif di balik partisipasi. Wawancara ini krusial untuk menangkap perspektif *emic*, yaitu sudut pandang subjek mengenai proses *hybrid* gerakan sosial.
2. Observasi Partisipatif dan Non-Partisipatif.
Observasi partisipatif akan dilakukan secara virtual (disebut juga *netnography* atau observasi digital) pada platform media sosial yang digunakan aktivis. Ini mencakup pemantauan grup *Telegram* atau *WhatsApp* tertutup serta analisis konten dan komentar pada akun resmi BEM atau *hashtag* yang *trending* di *Twitter/X* dan Instagram sebelum, selama, dan setelah aksi (Fu, 2018). Sebaliknya, observasi non-partisipatif akan difokuskan pada pengamatan langsung terhadap jalannya demonstrasi di Kantor DPR, mencakup perilaku massa, *content* spanduk, interaksi dengan aparat, dan dinamika orasi. Observasi ini berfungsi untuk merekam aktivitas *offline* secara objektif. Kombinasi dua jenis observasi ini memastikan perbandingan *real-time* antara klaim di dunia maya dan realitas di lapangan.
3. Analisis Dokumen dan Konten Digital (*Digital Content Analysis*).
Teknik ini melibatkan pengumpulan data sekunder berupa dokumen formal (seperti surat izin aksi, rilis pers resmi BEM) dan konten digital mentah yang terekam secara permanen. Analisis konten digital mencakup *scraping* data *hashtag*, menganalisis frekuensi *post* dan *engagement* yang dihasilkan di platform media sosial, serta meninjau pemberitaan media lokal. Teknik ini sangat penting untuk mendokumentasikan jejak digital demonstrasi dan memverifikasi konsistensi narasi yang diklaim dalam wawancara dengan bukti empiris digital.

Dengan mengintegrasikan wawancara, observasi, dan analisis konten digital, penelitian ini mencapai triangulasi metode yang kuat, yang sangat penting untuk membangun validitas dan kredibilitas dalam studi kasus kualitatif yang kompleks.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian studi kasus kualitatif ini adalah model interaktif yang melibatkan tiga alur kegiatan utama yang terjadi secara simultan, yakni:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses analisis dimulai segera setelah pengumpulan data, di mana data mentah yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumen digital direduksi. Reduksi data melibatkan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data untuk mengidentifikasi tema-tema inti yang relevan dengan perbedaan strategi aktivisme *offline* dan digital. Pada tahap ini, peneliti akan memfokuskan koding pada strategi *framing* narasi, motif mobilisasi, dan perbedaan *platform* yang digunakan oleh aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Indonesia.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bertujuan untuk mengorganisir dan menyusun informasi yang tereduksi agar memungkinkan penarikan kesimpulan yang valid. Peneliti akan menggunakan berbagai matriks, bagan alir, dan peta konsep untuk memvisualisasikan data (Yin, 2018:144). Secara spesifik, penelitian ini akan mengembangkan: *Pertama*, Matriks Perbandingan Narasi, yang membandingkan secara berdampingan tuntutan formal dari rilis pers *offline* dengan *trending hashtag* dan *meme* di media digital. *Kedua*, Bagan Alir Interaksi *Hybrid*, yang memetakan alur informasi dua arah, bagaimana keputusan yang diambil di ruang sekretariat kampus (data wawancara) diterjemahkan menjadi *post viral* (data digital) dan kemudian memengaruhi jumlah massa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (data observasi). Penyajian data yang terstruktur ini sangat penting untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan anomali dalam interaksi antara kedua jenis aktivisme tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

Kesimpulan awal ditarik secara sementara sejak awal analisis, namun kemudian diverifikasi dan diperkuat secara berulang. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi data, yaitu membandingkan data yang dikumpulkan dari tiga sumber berbeda (wawancara, observasi, dan konten digital) untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan. Kesimpulan akhir akan difokuskan pada artikulasi perbedaan strategis dan dampak sinergis dari aktivisme *offline* dan digital pada Demonstrasi Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Proses verifikasi yang ketat ini bertujuan untuk memvalidasi model *hybrid* aktivisme yang ditemukan, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis yang kuat terhadap studi gerakan sosial kontemporer di Indonesia.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan atau kredibilitas data merupakan kriteria utama dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan realitas yang diteliti, bukan sekadar konstruksi peneliti. Untuk mencapai tingkat kredibilitas tinggi dalam menganalisis perbedaan aktivitas *offline* dan digital pada demonstrasi ini, peneliti akan menerapkan tiga teknik, yaitu:

1. Triangulasi Sumber dan Metode

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang sama dari berbagai sumber data primer (koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), peserta aksi, pihak pengamanan) dan data sekunder (dokumen resmi, konten media sosial). Jika narasi mengenai strategi mobilisasi digital konsisten di antara koordinator dan dikonfirmasi oleh *postingan* di media sosial, maka data tersebut dianggap kredibel. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi lapangan, dan analisis konten digital. Kontradiksi atau ketidaksesuaian yang ditemukan selama proses triangulasi akan mendorong peneliti untuk kembali ke lapangan atau sumber data untuk verifikasi lebih lanjut.

2. Teknik Perpanjangan Keikutsertaan (*Prolonged Engagement*) dan Ketekunan Pengamatan (*Persistent Observation*)

Perpanjangan keikutsertaan dilakukan dengan menghabiskan waktu yang memadai di lokasi penelitian (lingkungan kampus dan ruang digital aktivis) sebelum, selama, dan setelah Demonstrasi Bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Waktu yang cukup ini diperlukan untuk membangun kepercayaan dengan informan kunci dan memahami konteks budaya serta dinamika politik lokal yang mendasari gerakan tersebut (Creswell, 2016:165). Sementara itu, Ketekunan pengamatan difokuskan pada identifikasi isu-isu yang paling relevan dan menonjol terkait perbedaan strategi *offline* dan digital misalnya, fokus pengamatan pada peran *bot* atau akun anonim dalam penyebaran narasi digital. Dengan fokus yang tajam pada isu-isu kritis, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar substantif dan tidak dangkal.

3. Pengecekan Anggota (*Member Checking*) dan Audit Trail (*Dependability and Confirmability*).

Pengecekan anggota melibatkan konfirmasi data yang telah dikodekan dan kesimpulan awal dengan informan kunci (koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)). Peneliti akan menyajikan transkrip wawancara dan temuan *framing* narasi digital kepada informan untuk memverifikasi apakah interpretasi peneliti sudah sesuai dengan maksud dan pengalaman mereka. Teknik ini merupakan cara paling otentik untuk membangun kredibilitas. Selanjutnya, untuk memastikan ketergantungan (*dependability*) dan konfirmabilitas (*confirmability*), peneliti akan membuat jejak audit (*audit trail*) yang rinci, mencatat secara metodis semua keputusan penelitian, dari pengkodean hingga penarikan kesimpulan, sehingga pembaca atau peneliti lain dapat melacak proses analisis dan memverifikasi keobjektifan interpretasi temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Desmirasari, R., & Oktavia, Y. (2022). Pentingnya bahasa Indonesia di perguruan tinggi. *Alinea: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajaran*, 2(1), 114-119. <https://doi.org/10.58218/alinea.v2i1.172>
- Dommett, K., Fitzpatrick, J., Mosca, L., & Gerbaudo, P. (2021). Are digital parties the future of party organization? A symposium on The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy by Paolo Gerbaudo. *Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica*, 51(1), 136-149. <https://doi.org/10.1017/ipo.2020.13>
- Fu, D. (2018). *Mobilizing without the masses: Control and contention in China*. Cambridge University Press.
- Gozali, F. (2023). *Peranan Media Sosial dalam Gerakan# ReformasiDikorupsi Menolak UU KPK Tahun 2019* (Doctoral dissertation, Universitas Bakrie).
- Iriansyah, M. N. (2025). “DEMO MAHASISWA SUDAH KELEWAT BATAS”: PENGARUH PEMBERITAAN MEDIA DAN PERSEPSI PUBLIK TERHADAP KETAHANAN SOSIAL-BUDAYA DI KOTA MAKASSAR. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 42-55. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i1.61430>
- Kompas. (2025). *Aksi Demo 1 September 2025 di Lampung, Begini Rekayasa Lalu Lintas Polisi*. Diakses pada 21 Oktober 2025, dari https://www.kompas.com/lampung/read/2025/09/01/124500988/aksi-demo-1-september-2025-di-lampung-begini-rekayasa-lalu-lintas-polisi?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop

- Pora, S., Nurmiyati, N., Syarifuddin, T. I., & Saputra, H. A. (2021). Transformasi Aktivitas K-Popers Di Media Sosial: Analisis Drone Emprit Dalam Framing Isu UU Cipta Kerja: Transformation Of K-Popers Activities In Social Media: Analysis Of Drone Emprit In Framing Issues Of Work Copyration. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 28-39. <https://doi.org/10.54144/govsci.v2i1.16>
- Rahmawan, D., Mahameruaji, J. N., & Janitra, P. A. (2020). Strategi aktivisme digital di Indonesia: aksesibilitas, visibilitas, popularitas dan ekosistem aktivisme. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 4(2), 123-144. <https://doi.org/10.24198/jmk.v4i2.26522>
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sitowin, P., & Alfirdaus, L. K. (2019). Media sosial dan gerakan sosial studi kasus: Penggunaan instagram dalam penolakan pendirian pabrik semen di kabupaten Rembang. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(03), 271-280.
- Tempo. (2025). *Kronologi Demo Memprotes DPR hingga Meluas Berubah Penjarahan*. Diakses pada 21 Oktober 2025, dari <https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182>
- Wiranata, I. M. A. (2022). *Pemetaan Teori-Teori Gerakan Sosial-Contoh Kasus di Berbagai Negara*. Airlangga University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (Vol. 6). Thousand Oaks, CA: Sage.